

Strategi Integratif Ekonomi-Sosial-Lingkungan untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan di Indonesia

Annida Fauziyah¹, Nerviana Dwi Kurniasih², Alfi Nur F. Abdullah³, Anisa Septianingrum⁴, Aulia Zahra Ningtias⁵, Siti Maghfiroh⁶

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

* Corresponding Author. Email: annidafauziyah52@gmail.com

Abstrak: Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan penduduk yang besar, memiliki potensi besar untuk mewujudkan ekonomi mandiri yang berkelanjutan. Artikel ini membahas strategi pembangunan ekonomi mandiri berkelanjutan melalui integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait. Pendekatan yang digunakan adalah kajian literatur sistematis dari sumber terpercaya, yang mencakup teori dan praktik pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan UMKM, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan ekonomi hijau merupakan kunci utama dalam mendukung kemandirian ekonomi. Strategi utama yang ditawarkan meliputi pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan inklusif, serta pengembangan produk lokal berdasarkan potensi daerah. Selain itu, artikel menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial, keterbatasan akses modal, dan kerusakan lingkungan. Pendekatan *Triple Bottom Line* dijadikan landasan integratif guna memastikan pertumbuhan inklusif yang berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: Ekonomi mandiri, berkelanjutan, ekonomi kerakyatan, UMKM, Triple Bottom Line.

An Integrative Economic-Social-Environmental Strategy to Achieve Sustainable Economic Independence in Indonesia

Abstract: Indonesia, endowed with abundant natural resources and a large population, holds substantial potential to realize a sustainable and self-reliant economy. This article discusses strategies for developing a sustainable self-reliant economy through the integration of interrelated economic, social, and environmental dimensions. The approach employed is a systematic literature review based on credible sources, encompassing both theoretical frameworks and practical applications of sustainable development in Indonesia. The findings indicate that the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs / UMKM), community empowerment, and the implementation of green economy principles serve as the main drivers of economic self-reliance. The proposed strategies encompass the empowerment of MSMEs, the enhancement of human resource capacity, the expansion of access to inclusive financing, and the development of local products based on regional potential. Furthermore, the article emphasizes the importance of synergy among the government, society, and the private sector in addressing challenges such as social inequality, limited access to capital, and environmental degradation. The Triple Bottom Line approach serves as an integrative foundation to ensure inclusive and sustainable growth in pursuit of Indonesia's Golden Vision 2045

Keywords: Self-reliant economy, sustainable development, people's economy, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Triple Bottom Line.

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berakar pada nilai dan semangat kedaulatan rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting harus dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan ekonomi untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Ekonomi kerakyatan tidak hanya fokus pada aspek ekonomis semata, melainkan mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan, yang dapat dianalisis melalui teori *Triple Bottom Line* (TBL) yang dikembangkan oleh (Elkington, 2013) dimana keberhasilan diukur dari keseimbangan antara *profit* (keuntungan ekonomi), *people* (kesejahteraan sosial), dan *planet* (keberlanjutan lingkungan).

Di Indonesia, sistem ini menjadi relevan karena potensi sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar, namun dihadapkan pada berbagai hambatan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi teknologi, kesenjangan sosial, serta lemahnya regulasi dan kelembagaan. Secara historis, pemikiran ekonomi kerakyatan yang dikembangkan oleh tokoh seperti Bung Hatta menekankan kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi sebagai fondasi pembangunan nasional, serta peran penting koperasi sebagai instrumen ekonomi rakyat berbasis budaya gotong royong. Implementasi nyata ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat dilihat melalui pemberdayaan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja, digitalisasi ekonomi rakyat untuk memperluas akses pasar, dan pengembangan ekonomi hijau yang menekankan efisiensi sumber daya dan pelestarian lingkungan. Pemerintah memiliki peran strategis dengan berbagai kebijakan pemberdayaan, pemberian modal usaha kecil, dan pembangunan infrastruktur hijau, sementara masyarakat dan sektor swasta berperan aktif dalam membangun ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan inovasi teknologi.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, pembangunan ekonomi harus melibatkan proses multidimensi yang mencakup perubahan sosial, politik, dan kelembagaan di masyarakat. Ekonomi kerakyatan menempatkan pelaku ekonomi sebagai pengambil keputusan yang mandiri berdasarkan potensi lokal sumber daya alam dan manusia. Hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Arifqi, 2020)

Pada Kajian teori kemandirian ekonomi menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, semangat kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan untuk mengurangi ketergantungan eksternal serta meningkatkan produktivitas lokal. Dalam kerangka yang lebih luas, teori pembangunan berkelanjutan seperti yang dikemukakan (Martinet, 2012) dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) memberikan arah strategis bagi Indonesia untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara harmonis guna mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan (Sachs, 2014). Sinergi ketiga pilar ini menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan krisis ekonomi, serta untuk mendorong resilient economy yang berkeadilan



hingga mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan bukan hanya sebuah konsep normatif, melainkan sebuah sistem yang harus diimplementasikan secara konkrit melalui sinergi antar stakeholder guna menciptakan ekonomi mandiri yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur yang sistematis untuk menggali strategi dan keterkaitan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mewujudkan ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia. Penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber terpercaya seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas konsep ekonomi mandiri, pembangunan berkelanjutan, serta pengalaman praktis di Indonesia. Dengan menelaah teori dan hasil penelitian terdahulu, metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan saling terkait dan memengaruhi keberhasilan strategi ekonomi kerakyatan. Analisis literatur yang rinci juga membantu merumuskan rekomendasi yang kontekstual dan terintegrasi berdasarkan data dan kajian empiris tanpa melakukan pengumpulan data primer, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif sesuai fokus artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari Hasil Penelitian, Kemandirian ekonomi yang berkelanjutan adalah salah satu tujuan penting pembangunan Indonesia di zaman sekarang. Tujuan ini tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Konsep ini menunjukkan upaya membangun sistem ekonomi yang bisa mandiri, berdaya saing, inklusif, serta mampu memenuhi kebutuhan warga saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan. Saat ini, Indonesia masih dalam proses transisi dan penguatan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan. Ada berbagai strategi yang diterapkan, seperti pengembangan potensi lokal, penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), digitalisasi, serta program pembangunan hijau.

Salah satu pendekatan yang digunakan adalah Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Strategi ini fokus pada pemberdayaan masyarakat dan daerah sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi lokal. PEL tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara bertahap. Namun, penerapan strategi ini masih menghadapi berbagai hambatan. Misalnya, para petani di desa masih bergantung pada tengkulak untuk menyalurkan hasil panen mereka, sehingga pendapatan mereka tidak optimal. Selain itu, keterbatasan akses permodalan dan kurangnya kerja sama antar daerah membuat masyarakat kesulitan meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian. Hal ini menyebabkan munculnya masalah sosial, seperti banyaknya utang kepada pihak rentenir. Oleh karena itu, diperlukan strategi lanjutan, seperti memperluas akses pasar, meningkatkan akses pembiayaan yang sehat, mengoptimalkan teknologi pertanian, serta mengembangkan produk olahan. Dengan demikian, ekonomi lokal bisa menjadi dasar

kemandirian yang inklusif dan berkelanjutan (Mandhaputri et al., 2023)

Selain itu, pemerintah juga semakin menekankan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Konsep ini sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan masa depan. Ekonomi hijau menekankan penggunaan sumber daya alam secara efisien, mengurangi polusi, menggunakan energi terbarukan, serta mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang lebih adil. Penerapan konsep ini diyakini mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan, serta mendorong inovasi yang ramah lingkungan. Meski demikian, ada banyak hambatan, yaitu biaya investasi teknologi hijau yang tinggi, akses yang tidak merata, kesadaran masyarakat yang masih rendah, hingga kelemahan regulasi pendukung. Untuk mencapai kemandirian berkelanjutan melalui jalur hijau, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta komitmen jangka panjang terhadap transformasi ekonomi hijau. (Judijanto & Al-Amin, 2025)

Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sangat penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional. UMKM terbukti memberikan kontribusi sebesar 61,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 98% tenaga kerja di Indonesia, sehingga menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi mandiri. UMKM juga membantu menciptakan pekerjaan baru, mengurangi angka pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah. Namun, UMKM masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam akses modal, bahan baku, dan pasar. Pandemi Covid-19 memperparah kondisi ini, dengan 82,9% UMKM mengalami dampak negatif seperti penurunan jumlah pelanggan, gangguan distribusi, dan kesulitan melunasi pinjaman. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pemulihan, seperti subsidi bunga kredit, restrukturisasi utang, bantuan tunai, serta digitalisasi pasar tradisional. Ke depan, kebijakan yang konsisten dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat daya saing UMKM sebagai fondasi ekonomi mandiri berkelanjutan (Ibrahim, 2022)

Transformasi digitalisasi UMKM semakin memperkuat arah pembangunan ekonomi mandiri. Melalui penggunaan teknologi digital, UMKM bisa memperluas akses ke pasar, meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen keuangan, serta memperkuat daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, digitalisasi juga bisa menjadi sarana pelestarian budaya karena produk unik daerah dan kerajinan tradisional dapat dipasarkan secara luas tanpa menghilangkan nilai budayanya. Namun, tantangan seperti rendahnya kemampuan digital pelaku usaha dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha sangat penting untuk memberikan pelatihan keterampilan digital dan memperkuat ekosistem usaha berbasis teknologi. Dengan transformasi digital yang merata, ekonomi Indonesia bisa berkembang ke arah kemandirian yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. (Nurina et al., 2024)

Selain Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan digitalisasi, pemerintah juga mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui program Indonesia *Green Growth* yang dijalankan oleh BAPPENAS bersama *Global Green Growth Institute* (GGGI). Program ini bertujuan mengatasi dilema

antara pertumbuhan ekonomi yang stabil dan masalah lingkungan yang semakin parah. Dalam 15 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil sekitar 6%, dengan sektor industri memberi kontribusi hingga 20,7% terhadap PDB. Namun, dampak negatifnya terlihat dalam berbagai masalah lingkungan seperti deforestasi, polusi udara, degradasi tanah, dan pencemaran lebih dari 52 sungai strategis, termasuk Sungai Citarum dan Ciliwung. Melalui *Green Growth*, pemerintah menetapkan lima tujuan utama, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, ketahanan sosial-lingkungan, pemulihan layanan ekosistem, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Strategi yang digunakan mencakup pengembangan energi terbarukan, menjaga hutan dan lahan gambut, memperkuat kawasan ekonomi hijau, serta penggunaan dana *Green Climate Fund* untuk pendanaan yang ramah lingkungan. Meski demikian, masih ada tantangan besar seperti rendahnya kesadaran masyarakat, dominasi investasi konvensional yang mengutamakan profit, tumpang tindihnya kebijakan, dan kurangnya riset teknologi hijau. Karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen politik, konsistensi kebijakan, serta penerapan yang luas hingga ke seluruh provinsi di Indonesia (Rany et al., 2020).

Dari berbagai upaya yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia sekarang berada pada fase penguatan yang penuh tantangan namun juga penuh peluang. Upaya melalui pengembangan ekonomi lokal, penerapan ekonomi hijau, penguatan UMKM, digitalisasi, serta program pertumbuhan hijau menunjukkan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia semakin inklusif dan berorientasi masa depan. Namun, tantangan struktural seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi teknologi, lemahnya regulasi lingkungan, serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama. Kemajuan Indonesia dalam meraih kemandirian ekonomi berkelanjutan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, peningkatan kapasitas masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal. Dengan komitmen yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara yang berada di jalur ekonomi mandiri, inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

Pembahasan

A. Strategi efektif untuk mewujudkan ekonomi mandiri yang berkelanjutan di Indonesia.

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bukanlah tugas yang sederhana dan memerlukan pendekatan strategis yang holistik. Strategi yang dirancang harus mampu menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pemberdayaan sosial serta pelestarian lingkungan, sehingga menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem.

1. Strategi mewujudkan ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia meliputi pengembangan UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa (Prayoga et al., 2019) menunjukkan pengembangan UMKM meningkatkan akses pasar dan memperkuat ekonomi lokal.
2. Kapasitas SDM yang baik juga penting, karena meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis dan produktivitas lokal (Suyatno, 2019). Peningkatan kapasitas SDM diarahkan pada penguasaan keterampilan teknis, manajerial, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

3. Akses terhadap sumber daya, terutama modal usaha dan pasar, menjadi kunci strategis mendorong ekonomi lokal yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta sangat penting untuk menyinergikan peran mereka dalam pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi, KUB, dan BUMDes menjadi kunci utama agar masyarakat bisa bergerak kolektif, memperluas posisi tawar, jejaring usaha, dan mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan strategi mewujudkan ekonomi mandiri yang berkelanjutan di Indonesia menitikberatkan pada aspek integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pendekatan *Triple Bottom Line* yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional menjadi kunci dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan inklusif, dan digitalisasi pasar yang memperluas peluang usaha serta menjaga nilai budaya lokal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga lokal seperti koperasi dan KUB memperkuat jaringan sosial-ekonomi yang inklusif, sementara penerapan ekonomi hijau menekankan efisiensi sumber daya, konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal, dan pengembangan energi terbarukan. Sinergi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk mengatasi tantangan modal, ketidakseimbangan sosial, dan kerusakan lingkungan, sehingga mendukung tercapainya pembangunan ekonomi inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

B. Keterkaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Dalam Mendukung Ekonomi Mandiri Berkelanjutan.

Dalam mewujudkan ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia, keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini berakar pada teori *Triple Bottom Line* (TBL) yang dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1994 melalui bukunya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Menurut Elkington, suatu bisnis atau pembangunan berkelanjutan harus mampu menyeimbangkan tiga pilar utama, yaitu *profit* (keuntungan ekonomi), *people* (aspek sosial atau kesejahteraan masyarakat), dan *planet* (kelestarian lingkungan hidup) secara simultan (Fara Brygita Ramadhani, 2024). Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari laba finansial semata, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

Aspek ekonomi menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian melalui peningkatan produksi domestik dan kemandirian sumber daya, seperti target swasembada pangan dan pengembangan energi terbarukan. Namun, pertumbuhan ekonomi semata tanpa dukungan aspek sosial tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan. Aspek sosial yang terintegrasi, seperti inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan, menjadi kunci agar tenaga kerja dapat



produktif dan masyarakat merasakan manfaat langsung dari pembangunan. Contohnya adalah program Kartu Prakerja yang dirancang untuk memperluas akses lapangan kerja hijau bagi pemuda di pedesaan, sehingga sekaligus mengurangi ketimpangan regional.

Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian nyata bagi ketahanan pangan dan sosial di Indonesia. Gangguan rantai pasok, pembatasan mobilitas, dan perlambatan produksi pertanian berdampak pada kelangkaan pangan dan kenaikan harga, yang meningkatkan risiko kemiskinan dan kerawanan pangan. Pemerintah merespons dengan kebijakan seperti relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian dan percepatan bantuan sarana produksi untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan. Namun demikian, pandemi menunjukkan pentingnya memperkuat sistem ketahanan pangan yang adaptif dan tangguh terhadap krisis serupa.

Aspek lingkungan juga memainkan peran krusial sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan. Pelestarian sumber daya alam, pengelolaan limbah secara ekonomi sirkular, serta konservasi hutan menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas jangka panjang. Inisiatif seperti program bank sampah dan *agroforestry* tidak hanya membantu mengurangi limbah dan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan sosialnya. (Wati et al., 2024)

Selain itu, penerapan teknologi digital dan inovasi pertanian ramah lingkungan dapat memperkuat (Kusuma & Fajri, 2024) ketahanan pangan dan perekonomian lokal. Penggunaan teknologi pertanian presisi, pemanfaatan big data untuk pengelolaan pangan, dan distribusi berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar bagi petani dan UMKM.

Dengan penerapan konsep *Triple Bottom Line* John Elkington yang memastikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia akan semakin kuat dan resilien dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi. Sinergi ketiga aspek ini akan menjadi fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

C. Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia.

Dalam mengarungi proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks dengan adanya tantangan dan peluang yang saling terkait. Di satu sisi, perjalanan menuju kemandirian ekonomi tidak lepas dari hambatan yang berasal dari kesulitan menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka terpadu. Namun, di sisi lain, Indonesia memiliki modal besar yang membuka cakrawala kesempatan untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara harmonis.

1. Tantangan Integrasi Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan :

Indonesia menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat berbagai tekanan dari kondisi global dan domestik. Ketegangan perdagangan global dan kebijakan proteksionis menekan permintaan ekspor Indonesia, sementara perlambatan konsumsi domestik dan investasi juga

menghambat pertumbuhan ekonomi. Tantangan yang mungkin muncul dalam mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia dapat berupa:

- a. Indonesia seringkali menghadapi berbagai hambatan signifikan dalam menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali kali menimbulkan konflik dengan perlindungan lingkungan lalu menghasilkan *trade off* yang sulit diatasi.

Contoh : adanya peningkatan aktivitas industri dan eksploitasi sumber daya alam yang kerap meningkatkan polusi udara dan kerusakan ekosistem, seperti pencemaran sungai dan deforestasi yang seringkali merusak keanekaragaman hayati (Rany et al., 2020).

- b. Adanya tantangan sosial akibat ketimpangan ekonomi dan kesenjangan akses, yang kini masih menjadi isu utama hingga saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum diiringi dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Ini menunjukkan bahwa aspek keadilan sosial dan dukungan terhadap masyarakat rentan masih belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam pembangunan ekonomi.
- c. Sistem kelembagaan di Indonesia masih kurang efisien dan selaras, sehingga menghasilkan biaya transaksi yang tinggi, proses pengelolaan yang rumit, peraturan yang saling tumpang tindih, serta ketidakseimbangan informasi antar pihak yang terlibat. Hal ini menyulitkan proses pelaksanaan program-program ekonomi hijau dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, sehingga makin sulit menerapkan konsep ekonomi mandiri yang inklusif. (Rusdiana et al., 2024).

D. Peluang Integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan untuk Ekonomi Mandiri Berkelanjutan

Meskipun menghadapi banyak tantangan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan

1. Negara ini kaya akan sumber daya alam, terutama di wilayah gambut, serta memiliki keanekaragaman hayati dan hutan tropis luas yang mendukung solusi berbasis alam (*Nature Based Solutions*). Sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara bijak sebagai dasar pembangunan ekonomi hijau dan mandiri.
2. Pemberdayaan komunitas lokal dengan pendekatan partisipatif dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal serta penguatan asosiasi dan koperasi menjadi strategi utama untuk mencapai kemandirian ekonomi yang juga melibatkan aspek sosial dan lingkungan. (Asnuryati, 2023)
3. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan sosial-ekonomi dan lingkungan yang sinergis dan inklusif.



Investasi berkelanjutan dalam penelitian dan riset teknologi ramah lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan penerapan ekonomi hijau di Indonesia (Megasari Sijabat Gunawan Widjaja, 2025).

E. Peran *Stakeholder* (Pemerintah, Masyarakat, Sektor Swasta) Dalam Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berkelanjutan Di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan ekonomi mandiri yang berkelanjutan, keterlibatan berbagai pihak atau stakeholder menjadi sangat krusial. Setiap elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, responsif, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Kolaborasi yang sinergis di antara para stakeholder ini menjadi fondasi utama agar kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, keterpaduan peran tersebut juga penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan

1. Pemerintah

Pemerintah merupakan pemegang mandat utama dalam mengelola arah pembangunan ekonomi nasional agar berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Peran pemerintah dalam mewujudkan ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia antara lain (Kasanah et al., 2024):

- a. Pemerintah memiliki fungsi utama sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*), fasilitator, dan pengarah pembangunan berkelanjutan. Melalui regulasi yang adaptif, pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi usaha hijau dan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
- b. Program fiskal dan kebijakan pembangunan pemerintah menaruh fokus pada penguatan daya saing lokal, termasuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta pembangunan infrastruktur hijau dan pemberdayaan komunitas desa sebagai unit ekonomi mandiri.
- c. Pemerintah daerah berperan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, namun efektivitas implementasi masih menghadapi kendala seperti minimnya kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.
- d. Pemerintah juga bertindak sebagai akselerator yang mempercepat pelaksanaan program ekonomi berkelanjutan dengan memastikan integrasi antara perencanaan, anggaran, dan implementasi di tingkatkan.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan komponen vital dalam pelaksanaan dan keberlanjutan ekonomi mandiri. Keterlibatan aktif mereka dalam pengelolaan sumber daya dan usaha lokal menjadi pondasi utama terciptanya ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan. Peran Masyarakat dalam mewujudkan ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia antara lain (Grace Yulianti et al., 2025):

- 1) Masyarakat lokal merupakan pelaku utama dalam pelestarian sumber daya alam dan penerapan praktek-praktek ekonomi berkelanjutan berbasis kearifan lokal, seperti pengelolaan lahan dan produksi sektor pertanian yang ramah lingkungan.
- 2) Partisipasi aktif masyarakat, terutama melalui lembaga lokal dan koperasi, memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memungkinkan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata.
- 3) Masyarakat juga sebagai konsumen dapat mendukung produk lokal yang berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada penguatan ekosistem ekonomi berkelanjutan di tingkat akar rumput.
- 4) Tantangan partisipasi masyarakat meliputi rendahnya kesadaran terhadap inovasi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan dan teknologi.

3. Sektor Swasta

Sektor swasta memiliki peranan penting sebagai penggerak investasi dan inovasi dalam berbagai bidang ekonomi. Peran ini sangat mendukung terbentuknya ekosistem usaha yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan lingkungan. Peran sektor swasta dalam mewujudkan ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia antara lain (Falih, 2024). Perusahaan swasta ikut berkontribusi melalui investasi, inovasi teknologi ramah lingkungan, dan penerapan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan.

- 1) Sinergi sektor swasta dengan pemerintah dan masyarakat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, serta memperkuat rantai pasok produk domestik.
- 2) Pengelolaan hubungan dengan stakeholder secara efektif dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dan memastikan keberlanjutan operasional dengan mengelola dampak sosial dan lingkungan yang positif.
- 3) Tantangan terbesar sektor swasta adalah menjaga keseimbangan antara tujuan profit dan tanggung jawab sosial serta lingkungan dalam jangka Panjang.

F. Integrasi Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Strategi integratif yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan kunci untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Integrasi aspek ekonomi fokus pada penguatan UMKM melalui pemberdayaan, akses pembiayaan, infrastruktur, dan digitalisasi, yang memungkinkan peningkatan daya saing dan akses pasar global bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Ayu Nursasi et al., 2024). Dari sisi sosial, integrasi menitikberatkan pada inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat, dengan peningkatan keterampilan, pengurangan ketimpangan, serta kolaborasi antar komunitas melalui ekonomi kerakyatan yang mendukung inovasi dan

kesejahteraan masyarakat luas (UNDP, 2020). Sementara itu, integrasi aspek lingkungan diwujudkan melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular yang mendorong efisiensi sumber daya, pengembangan energi terbarukan, dan konservasi berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif pembangunan tetapi juga membuka peluang ekonomi baru sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat (Irawan et al., 2024) pedesaan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan strategi ini, sekaligus memperkuat pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada energi bersih, konsumsi dan produksi berkelanjutan, dan aksi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, hasil integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan pada strategi pembangunan ekonomi mandiri berkelanjutan di Indonesia adalah terciptanya sinergi yang kuat antara penguatan UMKM melalui pemberdayaan dan digitalisasi, peningkatan kapasitas sosial komunitas untuk inklusi dan pengurangan kesenjangan, serta pelaksanaan ekonomi hijau yang mendorong efisiensi sumber daya dan konservasi berbasis kearifan lokal. Integrasi ini menghasilkan pembangunan inklusif yang tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pendekatan tersebut memberikan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* terkait energi bersih, produksi berkelanjutan, dan mitigasi perubahan iklim. Keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai fondasi implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian ekonomi yang resilien, adil, dan berwawasan lingkungan menuju visi Indonesia Emas 2045.

SIMPULAN

Strategi integratif yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perluasan akses pembiayaan yang inklusif agar ekonomi lokal kuat dan mampu bersaing di pasar global. Digitalisasi berbasis teknologi informasi juga menjadi pilar penting dalam memperluas pasar sekaligus menjaga nilai budaya lokal.

Aspek sosial yang meliputi inklusivitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial harus menjadi fokus utama agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata. Partisipasi aktif masyarakat, terutama melalui lembaga lokal seperti koperasi dan lembaga mikro, memperkuat jejaring sosial dan ekonomi yang inklusif serta mendorong kemandirian komunitas desa.

Sementara itu, memastikan aspek lingkungan tidak kalah pentingnya dalam keberlanjutan perekonomian. Penerapan ekonomi hijau dan prinsip penghentian yang berbasis kearifan lokal menjadi yayasannya dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak merusak ekosistem dan sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis konservasi. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar regulasi, investasi, dan program-program berkelanjutan dapat berjalan secara efektif

dan berkesinambungan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, keterbatasan modal, dan kerusakan lingkungan, pendekatan *Triple Bottom Line* yang menyeimbangkan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan harus menjadi panduan utama pembangunan. Dengan komitmen politik yang kuat, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara dengan ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, strategi pemberdayaan UMKM, penguatan kapasitas SDM, serta penerapan ekonomi hijau yang didukung oleh sinergi multi-pihak merupakan fondasi penting yang harus dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan agar kemandirian ekonomi Indonesia dapat terwujud sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial untuk generasi kini dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifqi, M. (2020). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No., 57–73. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/1554>
- Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2175–2183. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/529>
- Ayu Nursasi, Nanda Hanifah, Rifani Tri Handani, & Sarpini Sarpini. (2024). Implementasi Kebijakan Integrasi Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 429–440. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3271>
- Elkington, J. (2013). Enter the triple bottom line. *The Triple Bottom Line: Does It All Add Up*, 1(1986), 1–16. <https://doi.org/10.4324/9781849773348>
- Falah, P. Al. (2024). Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pertanian Berbasis Komunitas. *Paradigma Mandiri Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi*, 02(02), 93–106. <https://jurnal.stisipwidyapuri-smi.ac.id/index.php/Prm/article/view/173>
- Fara Brygita Ramadhani, C. H. (2024). Penerapan Triple Bottom Line Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. *Akuntansi*, 3(2), 156–162. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i2.1997>
- Grace Yulianti, Mohamad Chaidir, & Farah Qalbia. (2025). Peran Stakeholder Dalam Mengukur Rente Ekonomi Perusahaan: Perspektif Baru Terhadap Keunggulan Kompetitif. *Jurnal Visi Manajemen*, 11(1), 248–260. <https://doi.org/10.56910/jvm.v11i1.596>
- Ibrahim, H. R. (2022). PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MELALUI PENDEKATAN INOVASI SOSIAL DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE. *Ilmu Dan Budaya*, 43, 497–509. <https://doi.org/10.4337/9781800371972.00053>



- Irawan, D., Marita, A. C., & Nurcahyaningtyas, N. (2024). Pendekatan ekonomi sirkular sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *E-Jurnal Sumberdaya Dan Lingkungan*, 13(1), 2303–2220. <https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/28294>
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2025). Penerapan Ekonomi Hijau Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Literatur Teoritis dan Empiris. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 52–60. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/1007>
- Kasanah, S. N., Suprastiyo, A., & Lukita, C. (2024). Analysis of the Role of Stakeholders in the Economic and Social Empowerment Program through the Agrosilvopastura System in Ngasem District , Bojonegoro Regency Analisis Peran Stakeholders dalam Program Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Melalui Sistem Agrosi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 12(2), 112–122. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/22186>
- Kusuma, A., & Fajri, C. (2024). Analisis Konsep Triple Bottom Line dalam Program Corporate Analysis of the Triple Bottom Line Concept in the Corporate Social Responsibility Program in Kampung Berseri Astra Gedangsari. 4(1), 30–39. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bcrev/article/view/12139>
- Mandhaputri, H. A., Aribowo, A., & Riasih, T. (2023). Local Economic Development through Potato Development Areas in Karamatwangi Village, Cisurupan District, Garut Regency. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 5(2), 115–134. <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v5i2.1039>
- Martinet, V. (2012). Economic Theory and Sustainable Development. *Theory & Struggle*, 1, 22–31. <https://doi.org/10.3828/ts.2015.6>
- Megasari Sijabat Gunawan Widjaja, F. (2025). Mengintegrasikan Ekonomi Hijau Dan Keberlanjutan: Kajian Literatur Atas Praktik Terbaik Di Berbagai Negara. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(1), 53–63.
- Nurina, L., Magisa, N. S., Ekobelawati, F., Iswanto, I., & Ishak, I. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Digital. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 107–115. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1751>
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui indonesia green growth program oleh BAPPENAS. *Jiep*, 20(1), 63–73. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/38229>
- Rusdiana, Hidayat, A., Mustofa, U., & Pratiwi, D. (2024). Analisis Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Balikpapan Dengan Permodelan Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA). *COMPACT: Spatial Development Journal*, 3(1), 252–265. <https://doi.org/10.35718/compact.v3i1.1161>
- Sachs, J. (2014). *the Age of Sustainable*. [https://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs Writing/2014/“The Age of Sustainable Development by Jeffrey D_ Sachs - Project Syndicate”.pdf](https://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs%20Writing/2014/\)
- UNDP. (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier Human Development and the Anthropocene. *Undp*, 1–7.

Wati, Y. S., Mauludin, M. S., & Janah, S. (2024). Pengembangan Usaha Berbasis Ramah Lingkungan Berdasarkan Konsep Triple Bottom Line (Studi Kasus Batik Lochantara). *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 12–24. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/view/1007>